
MANAJEMEN KEUANGAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN PESANTREN DI PESANTREN DARUNNAJAH 2 CIPINING

Ricky Praditya Sukma Permana

Universitas Darunnajah

Musthafa

Universitas Darunnajah

Nailil Muna Sholihah

Universitas Darunnajah

Korespondensi penulis: penulis.a.farid@darunnajah.ac.id

Abstract. *Educational institutions that are classified as having independence to a certain extent are Islamic boarding schools, both in terms of funding and in providing education. Not a few Islamic boarding schools have been able to properly implement the al-itimid principle ala alnafs, the al-najah principle, namely relying on oneself and optimizing one's potential as the basis for success, there are even some Islamic boarding schools that are able to empower the local economy. In this research, the researcher tries to take an approach that is closely related to what will be researched, where the approach is used as a reference in the research process. The method in this research is that the researcher uses qualitative data collection techniques with descriptive methods to provide a systematic description of the situation, facts and phenomena found in the location to be studied. The research results show that in its efforts to build the independence of Islamic boarding schools. To build the independence of Islamic boarding schools, not only with a vision and mission, it is necessary to have funds to support the Islamic boarding school.*

Keywords: *Management, financing and independence*

Abstrak. Lembaga pendidikan yang tergolong memiliki kemandirian pada batas tertentu adalah pesantren, baik dalam hal pendanaan maupun dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit pesantren yang telah mampu menyelenggarakan dengan baik asas al-itimid ala alnafs asas al-najah yakni bersandar pada diri sendiri dan mengoptimalkan potensi diri pangkal kesuksesan, bahkan ada beberapa pesantren yang mampu memperdayakan ekonomi sekitar. Pada penelitian ini peneliti berupaya melakukan pendekatan yang erat kaitannya dengan apa yang akan diteliti, dimana pendekatan digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian. Adapun metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai situasi, fakta, dan fenomena yang terdapat pada lokasi yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya membangun kemandirian pesantren. untuk membangun kemandirian pesantren tidak hanya dengan visi misi saja diperlukan adanya dana yang di dukung untuk pesantren.

Kata kunci : Manajemen, Pembinaan dan kemandirian.

LATAR BELAKANG

Lembaga pendidikan yang tergolong memiliki kemandirian pada batas tertentu adalah pesantren, baik dalam hal pendanaan maupun dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak sedikit pesantren yang telah mampu menyelenggarakan dengan baik asas al-itimid ala alnafs asas al-najah yakni bersandar pada diri sendiri dan mengoptimalkan potensi diri pangkal kesuksesan, bahkan ada beberapa pesantren yang mampu memperdayakan

ekonomi sekitar. Contohnya pondok pesantren darunajah 2 cipining yang mampu mengelola usaha-usaha untuk memperdayakan diri dalam segi ekonomi bukan darunnajah 2 cipining mampu mengelola keuangan dengan optimal .

Tujuan adanya pesantren tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006 Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa, adanya pesantren bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Akhlaq mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan serta keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama islam (*Mutafaqquh fiddin*) dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat¹.

Pesantren dengan berbagai harapan dan predikat yang dilekatkan kepadanya, sesungguhnya berujung pada tiga fungsi utama yang senantiasa diembannya, yaitu: pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama (*centre of excellence*). Kedua, sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia (*human resource*). Ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat (*agent of development*).² Selain ketiga fungsi tersebut pesantren juga dipahami sebagai bagian yang terlibat dalam proses perubahan sosial (*social change*) di tengah perubahan yang terjadi.

Pada batas tertentu pesantren tergolong di antara lembaga pendidikan keagamaan swasta yang leading, dalam arti berhasil merintis dan menunjukkan keberdayaan baik dalam hal kemandirian penyelenggaraan maupun pendanaan (*self financing*). Tegasnya selain menjalankan tugas utamanya sebagai kegiatan pendidikan Islam yang bertujuan regenerasi ulama, pesantren telah menjadi pusat kegiatan pendidikan yang konsisten dan relatif berhasil menanamkan semangat kemandirian, kewiraswastaan, semangat berdikari yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain.³

Pesantren sebagai bagian dari sub kultur masyarakat, dengan situasi apapun tetap hidup dengan kokoh walaupun dengan apa adanya.⁴ Kemampuan kyai, para ustad, santri

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006 Pasal 26 Ayat 1

² Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim et. al. *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 233.

³ Habib Thoaha, *Kapita Selektta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 52 hlm.

⁴ Ismail SM dkk (ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), xiv.

dan masyarakat sekitar, menjadi perhatian serius untuk meneguhkan atau setidaknya meningkatkan kompetensi pesantren dalam visinya itu. Tetapi, di sisi lain ada juga pesantren yang mulai berfikir ulang dalam rangka meningkatkan kemampuan finansialnya, dan acapkali menjadi masalah serius sehingga membuat pesantren kurang dapat melaksanakan visi dan program utamanya. Masalah dana memang menjadi masalah dan tantangan besar bagi pengembangan sebagian lembaga pesantren di Indonesia, padahal potensi yang ada dalam komunitas pesantren dan ekonomi sebenarnya cukup besar.

Perubahan dan pengembangan pesantren terus dilakukan, termasuk dalam menerapkan manajemen yang profesional dan aplikatif dalam pengembangannya. Karena istilah manajemen telah membaur ke seluruh sektor kehidupan manusia.⁵ Di antara pengembangan yang harus dilakukan pesantren adalah, pengembangan sumber daya manusia pesantren, pengembangan komunikasi pesantren, pengembangan ekonomi pesantren, pengembangan teknologi informasi pesantren dan pengembangan infrastruktur pesantren. tentunya hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan tunjangan kepada setiap lembaga Pendidikan khususnya pesantren. Sebagaimana tertera dalam RUU tentang Pesantren. pasal 49 ayat 1 berbunyi, pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan⁶.

Pemerintah telah menyediakan dana untuk pesantren, namun bukan berarti pesantren hanya bergantung dari dana tersebut. Pesantren harus bisa menjadi lembaga yang mandiri. Yaitu pesantren yang mampu mengelola dan menghasilkan dana tanpa mengharap bantuan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui pembiayaan adalah suatu komponen strategik yang dapat menentukan maju atau tidaknya suatu tujuan pendidikan yang telah dibuat.⁷ Sudah banyak pesantren yang mampu menjadi pesantren mandiri, contohnya saja pesantren Darunajah Ulujami yang berada di Jakarta selatan, pesantren yang didirikan pada tahun 1974⁸. ini sudah mampu menjadi pesantren yang mandiri dapat

⁵ Syamsudduha, *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Guru, 2004), 15- 16hlm.

⁶ RUU tentang *Pendanaan Pesantren*. bab v pasal 49 ayat 1

⁷ Siti Mazidah, *Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren*. Jurnal pendidikan dan pendidikan dasar. Vol 3.No 1.2018

⁸ Hadiyatullah. *Dari Pesantren ke Pesantren*. (Jakarta: Penerbit erlangga). 2018.hlm 253.

kita ketahui bersama pesantren ini dapat mengembangkan bisnis seperti super market, koperasi, air mineral dan lain-lain guna penunjang keuangan pesantren. Namun untuk mencapai titik ini dibutuhkan waktu yang cukup lama.

Pesantren yang baru berdiri tentu tidak bisa menunggu waktu yang selama itu untuk mencapai kemandirian, Pesantren harus mampu bertahan ditengah tuntutan zaman dan persaingan dengan lembaga lain. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang cocok untuk diimplementasikan dalam pendidikan pesantren agar dapat menjadi pesantren mandiri yang tidak bergantung dari dana pemerintah serta dapat menghasilkan dan mengelola dana sendiri. Kemandirian bukan berarti menyendiri atau serba sendiri. Seorang yang mandiri adalah seseorang yang mampu membangun nilai pada dirinya sehingga mampu menjadi bermanfaat bagi kehidupan.⁹ Pembiayaan dalam bidang pendidikan tidak lepas dari kebutuhan pendidikan baik yang secara langsung maupun tidak langsung. pendanaan dalam pendidikan didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang dikeluarkan baik itu berupa uang, barang, dan tenaga, jumlah gaji guru, dan umlah siswa¹⁰.

Dilihat dari fungsi manajemen secara umum, maka manajemen pesantren memerlukan lima fungsi manajemen yaitu : perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan/pelaksanaan (*actuating*), memimpin (*guiding*), mengendalikan (*controlling*) dan pencapaian tujuan (*the achievement of the goal*)¹¹. dari kelima fungsi tersebut menegaskan betapa pentingnya manajemen terhadap pesantren, terlebih lagi manajemen yang mengatur dalam lingkup pembiayaan pesantren.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti berupaya melakukan pendekatan yang erat kaitanya dengan apa yang akan diteliti, dimana pendekatan digunakan sebagai acuan dalam proses penelitian. Untuk memperoleh pemahaman secara mendalam dan lebih luas mengenai situasi sosial berdasarkan fakta-fakta keterangan di lapangan dengan maksud

⁹ Misjaya, Didin Saefudin Bukhori, Adian Husaini, Ulil Amri Syafri. *Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo-Jawa timur*. Jurnal pendidikan islam. Vol 8. No 1. Februari 2019

¹⁰ Nur Eka Setiowati. *Manajemen Pembiayaan pondk pesantren DAN Lembaga Pendidikan Terpadu* Nurul Shiddiq Cirebon. Jurnal Manajemen Pendidikan d.k.k. hlm.170

¹¹ Baharuddin dan Moh. Makin. *Manajemen Pendidikan Islam*. (Malang: Uin-Maliki Malang Press). 2016. Hlm. 69

mendeskripsikan serta sebagai gambaran secara aktual dan faktual mengenai fenomena-fenomena yang ingin diteliti. Adapun metode dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai situasi, fakta, dan fenomena yang terdapat pada lokasi yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen yang di terapkan pesantren

a. perencanaan

Hasil penelitian yang telah didapatkan menerangkan bahwa pada dasarnya perencanaan menjadi sebuah urgensi yang sangat penting dalam memulai sebuah sistem. Tanpa adanya perencanaan yang baik tentunya kegiatan tidak kan berjalan sesuai dengan harapan. Perencanaan mempunyai pengaruh yang besar dan menjadi faktor keberhasilan sebuah sistem dengan latar belakang apapun kegiatan tersebut. Karena 60% keberhasilan dari sebuah aktivitas terletak pada kematangan menyiapkan sebuah perencanaan.¹²

dalam sistem perencanaan TU keuangan di pesantren darunnajah cipining yaitu dengan adanya pengarahannya dari direktur keuangan dengan staff TU keuangan untuk evaluasi dan penyesuaian sistem tugas TU keuangan dan untuk trus memutarakan sistem keuangan pesantren dari hasil pendapatan yang masuk ke TU keuangan.

Adapun tujuan untuk meningkatkan efektivitas pesantren yaitu dengan memberikan segala kebutuhan pesantren seperti menyediakan dana untuk pembanguna dan sarana prasana pesantren. Agar dapat menggunakan dana pesantren kita harus menggunakan anggaran yang kita ajukan.

Adapun mekanisme dan alur pengajuan anggaran di darunnajah cipining sebagai berikut:

- 1) Anggaran harus di tanda tangan bendahara divisi
- 2) Anggaran harus di setuju oleh kepala divisi terkait masing-masing

¹² Tim dosen administrasi pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 101.

- 3) Anggaran harus di tanda tangan dan di ketahui oleh direktur masing-masing.

Itulah tahapan-tahapan yang harus kita lalui agar bisa mengajukan anggaran untuk penggunaan dana.

Jika surat anggaran sudah selesai tahapannya maka anggaran harus di serahkan ke staff TU keuangan untuk di upload SPMU online oleh staff keuangan dan setelah itu anggaran bisa di ambil oleh pihak yang menggarkan.

Dalam upaya manajemen bertanggung jawab pakai dana keuangan pesantren darunnajah cipining staff TU keuangan selalu mengawasi setiap anggaran terlebbih dari anggaran yang sudah di belanjakan karna setiap anggaran yang sudah di belanjakan harus ada dipertanggung jawabkan dengan sesuai yang tertera di anggarankan.

Adapun Standar minimal laporan pengguna dana SPMU pondok pesantren darunnajah 2 cipining sebagai berikut :

- 1) Membuat format laporan penggunaan dana SPMU sesuai dengan format yang sudah di tentukan (Format File Excel dari Keuangan, di ketik, dan di print)
- 2) Melampirkan print out realisasi laporan penggunaan dana SPMU
- 3) Melampirkan print out anggaran yang sudah tertandatangani oleh Pembina Pesantren, dan Departemen-Departemen terkait
- 4) Melampirkan print out SPMU yang sudah tertandatangani oleh Pembina Pesantren, dan Departemen-Departemen terkait
- 5) Melampirkan bukti-bukti nota/kwitansi pembelian
- 6) Tidak menerima nota/kwitansi yang tidak ada tandatangan pembeli, penerima atau penjual, cap/stempel toko, serta tidak ada tanggal pembelianya. (Tandatangan penerima dan penjual wajib diberi nama)
- 7) Tidak menerima nota/kwitansi prinan atau tulis tangan dari DNC MART (bukti nota/kwitansi harus berupa struk)
- 8) Tidak menerima nota/kwitansi penyewaan barang-barang inventaris yang dikeluarkan oleh masing masing Departemen (Bukti nota/kwitansi penyewaan dan pembayaran wajib dari TU Keuangan).

Itulah standar minimal pengguna dana agar dana bisa di laporkan setelah belanja maka pengguna dana harus bertanggung jawab atas dana yang telah di belanjakan.

Dalam pertanggung jawaban laporan anggaran darunnajah mempunyai struktur yang khusus untuk mamenej pelaporan anggaran yaitu tim audit pesantren. Tim audit ini yang senantiasa mengkoreksi anggaran agar anggaran sesuai dengan yang di belanjakan yang akan di laporkan ke pihak TU keuangan karna tim audit sendiri akan mendokumentasikan laporan yang sudah selesai di laporkan.

b. Pegorganisasian

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengorganisasian TU keuangan harus mempunyai staff yang mumpuni dalam menghasilkan kinerja yang baik oleh TU keuangan mebuat struktur untuk memudahkan kinerja staff keuangan adapun struktur yang di buat oleh departemen Keuangan sebagai berikut : sepetir direktur keuangan, akunting departemen usaha, akunting general, amen sunduk, bagian akunting, bagian audit, bagian tabungan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan TU keuangan ini pengalaman dan dapat menjaga kepercayaan oleh pondok karna di TU keuangan ini pasti adanya dana pondok yang harus dijaga. Dalam pelaksanaan ini adanya staff yang trus berkontribusi dalam keuangan yakni :

- Staff akunting usaha yang bterbtugas dalam menydadta pemasukany maupun penygeluarany usaha-usaha pesantren.
- Amen sunduk yang bertugas untuk mengambil uang dari brangkas keuangan pesantren atau mengambil uang dari bank (dana pesantren yang ditabungkan).
- Dan frondes keuangan yang bertugas menjaga kantor TU keuagan untuk menerima pembayaran spp wali santri dan apabila ada santri yang hendak menabung uang.

b. Kontroling

Adapun kontroling dari direktur keuangan TU keuangan pesantren mengadakan rapat mingguan yakni guna membahas masalah-masalah yang ada di TU keuangan selain direktur keuangan juga mengontrol staff nya melalui grup WhatsApp guna menanyakan progres harian staf tu keuangan.

2. Kemandirian keuangan pesantren darunnajah cipining

Dalam upaya membangun kemandirian pesantren. untuk membangun kemandirian pesantren tidak hanya dengan visi misi saja diperlukan adanya dana yang di dukung untuk pesantren dana ini yang menopang pesantren agar pesantren bisa lebih maju dan trus berdiri sendiri di situ pesantren harus bisa memanajemen keuangan agar pesantren itu bisa berdiri.

Dalam kemandirian TU keuanga di pesantren darunnajah cipining ini sudah mandiri karna sejak awal ust muddatsir mejanbat kepala TU keuangan tahun 2012 sudah mandiri dari program-program yang sudah dilaksanakan kalo awal-awal informasinya sebelum ust muddatsir masuk ke TU keuangan memang belum mandiri karna masih di subsidi oleh pesantren pusat yakni darunnajah ulujami dan setelah ust muddatsir masuk ke TU keuangan sudah mandiri. jadi apapun kegiatan yang kita lakukan itu sudah mandiri. Dari segi struktur keuangan maupun dari segi usaha-usaha sendiri.

Adapun untuk mendukung kegiatan keuangan sendiri karna adanya struktur yang terus berjalan sampai sekarang struktur ini yang terus memenej keuangan pesantren struktur ini terdiri dari : direktur keuangan, wakil direktur, bendahara keuangan, amen sunduk (amen sunduk ini yang bertugas mengambil uang di berangkas pesantren), bagian akunting, bagian audit, bagian tabungan dan ada bagian frondes bagian ini yang menjaga TU keuangan apabila ada wali santri yang mau membayar spp atau santri yang mau menabung.

Dan dsinilah TU keuangan pesantren bisa tertata rapih karna adanya kontroling dari direktur keuangan pesantren darunnajah 2 cipining dengan melakukan rapat evaluasi setiap minggunya guna untuk membahas masalah-masalah yang ada entah itu dari wali santri ataupun dari sistem pelaporan anggaran sendiri karna pelaporan anggaran biasanya selalu ada berbagai macam kendala yang dilalui TU keuangan. Maka dari itu keuangan pesantren

darunnajah 2 cipining selalu memtau program kumpul pelaporan anggaran agar laporan anggaran selalu di laporkan dan mencari solusi apa saja kendala yang di hadapi guna bisa mencari solusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil simpulan bahwa sebagai berikut: Sebuah Pesantren agar bisa menjadi besar harus menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan di dukung dengan usaha-usaha yang trus dikembangkan agar dapat menambah dana pendapatan pesantren. Dan dengan pengelolaan keuangan yang baik dan terarah.

Keuangan pesantren sudah mandiri sejak tahun 2012 karna darunnajah 2 cipining sudah tidak lagi di subsidi oleh darunnajah pusat karna itu darunnajah 2 cipining menggunakan dana dari usaha-usaha pesantren untuk pembangunan sarana prasana pesantren darunnajah 2 cipining.

DAFTAR REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006 Pasal 26 Ayat 1
- Suhartini. (2005). “*Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren*“, dalam A. Halim et. al. *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Habib Thoah, (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ismail SM dkk (ed). 2002). *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Wahjoetomo. (1997). *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press).
- Syamsudduha. (2004). *Manajemen Pesantren: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Guru).
- RUU *tentang Pendanaan Pesantren*. bab v pasal 49 ayat 1
- Siti Mazidah. (2018) *Manajemen Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren*. Jurnal pendidikan dan pendidikan dasar. Vol 3.No 1.
- Hadiyatullah. (2018.) *Dari Pesantren ke Pesantren*. (Jakarta: Penerbit erlangga).
- Misjaya, Didin Saefudin Bukhori, Adian Husaini, Ulil Amri Syafri. (2019). *Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo-Jawa timur*. Jurnal pendidikan islam. Vol 8. No 1.
- Nur Eka Setiowati. *Manajemen Pembiayaan pondk pesantren DAN Lembaga Pendidikan Terpadu Nurul Shiddiq Cirebon*. Jurnal Manajemen Pendidikan d.k.k.
- Baharuddin dan Moh. Makin. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam*. (Malang: Uin-Maliki Malang Press).

- Nuril Azizah Megananda. (2018). “*Manajemen Pembiayaan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren Di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo*”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Malang.
- Sondang P. Siagian. Op. Cit.,
- Samiyah, Tesis: *Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan*, di Univeritas Islam Malang (Unisma), Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/3334/1/13710015.pdf>, Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 21.26 WIB.
- Zainuddin Al Haj Zaini. (2015). Disertasi: “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Sekolah*, (Studi Multikasus di SD Integral Lukman Hakim, SMP Ahmad Yani dan Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum Jember), (Malang: UIN Malang).
- Asfila, Murniati dan Nasir Usman, Jurnal: *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs N Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Meriah*, Diakses dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jap/article/view/2598/2452>, Pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 21.35 WIB
- Baihaqi, Jurnal: *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada SMK Negeri di Kabupaten Aceh Besar*, Diakses dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jpp/article/view/2024/1984>, Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 21.16 WIB
- Dedy Achmad Kurniady, *Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung*. (Jurnal penelitian pendidikan vol 12 No 1 april 2011).
- Hikmat. (2009). *Manajemen Pendidikan*, (Pustaka Setia –Bandung).
- E. Mulyasa. (2011). *Menjadi Kepala Sekolah Professional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).
- Fatimah, Enung. (2006). *Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Fattah Nanang. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Farid, A., & Pratama, Al (2020). Pengaruh gaya kepemimpinan informasional kepala sekolah terhadap etos kerja guru di SMP Al-Farisi Tapos Tenjo Bogor. *Manajemen Islam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* , 3 (02), 143-165.
- Rosidin, S., Pratama, A. I., & Farid, A. (2024). Manajemen Pendidikan Kepramukaan Dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP Darunnajah 2 Cipining Bogor. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 44-51.